

PERAN KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Dodi Pramana¹, Dea Safitri², Febri Angelyos Br. Manalu³, Furqan Young⁴, & Kelvin Pakpahan⁴

*Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
dea9037@gmail.com, febriangelyosbrmanalu@gmail.com,
kelfinpakpahan@gmail.com*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, pengurus BUMDes, serta pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, serta kualitas produk pelaku UMKM. Namun, koordinasi tersebut masih terbatas pada aspek teknis dan belum menyentuh pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi strategis diperlukan agar BUMDes dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing UMKM di tingkat desa.

Kata kunci: Koordinasi; Pemerintah Desa; Bumdes; Pengembangan UMKM; Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract:

This study aims to analyze the role of coordination between the village government and the Village-Owned Enterprises (BUMDes) in developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kolam Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. This research employs a descriptive qualitative approach, using observation, interviews, and documentation techniques involving village officials, BUMDes administrators, and MSME actors. The results show that coordination between the village government and BUMDes has had a positive impact on increasing income, customer numbers, and product quality among MSME players. However, the coordination remains limited to technical aspects and has not yet addressed human resource empowerment through training and mentoring programs. The study concludes that strengthening strategic coordination is essential for BUMDes to play a more effective role in enhancing the independence and competitiveness of MSMEs at the village level.

Keyword: Coordination; Village Government; Bumdes; MSME Development; Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Salah satu langkah strategis yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes hadir sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan dalam mengelola potensi lokal sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, keberadaan BUMDes diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa. Di berbagai daerah, termasuk Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, BUMDes dibentuk dengan tujuan menggerakkan potensi ekonomi lokal agar lebih produktif dan berdaya saing.

Namun, dalam praktiknya, hubungan dan koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes tidak selalu berjalan efektif. Idealnya, pemerintah desa berperan dalam memberikan arahan, bimbingan, serta kebijakan strategis, sementara BUMDes menjalankan fungsi operasional melalui kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai hambatan, seperti komunikasi yang belum terjalin dengan baik, perbedaan persepsi dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Akibatnya, sejumlah program ekonomi desa belum mampu berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami koordinasi sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan UMKM di tingkat desa. Melalui koordinasi yang sinergis antara pemerintah desa dan BUMDes, kegiatan ekonomi desa dapat berlangsung lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki fungsi strategis sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator administrasi, sementara BUMDes bertindak sebagai pelaksana teknis yang langsung berinteraksi dengan pelaku UMKM. Apabila kedua pihak mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang harmonis, maka potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari sisi keilmuan, penelitian ini berangkat dari adanya research gap antara teori dan kenyataan empiris. Sejumlah studi terdahulu cenderung menyoroiti peran BUMDes secara individual dalam peningkatan ekonomi desa atau menelaah kebijakan pemerintah desa secara terpisah, tanpa melihat hubungan koordinatif di antara keduanya. Padahal, efektivitas BUMDes dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada dukungan kebijakan, supervisi, dan kolaborasi pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan UMKM di Desa Kolam.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan kolaboratif yang digunakan untuk menilai efektivitas koordinasi antar lembaga desa dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini tidak hanya menilai peran BUMDes sebagai entitas ekonomi, tetapi juga menelaah bagaimana sinergi kebijakan, komunikasi, dan pembagian peran antara pemerintah desa dan BUMDes dapat menciptakan sistem pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola ekonomi desa yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran koordinasi pemerintah desa dengan BUMDes dalam pengembangan UMKM, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut. Landasan berpikir penelitian ini disusun berdasarkan teori koordinasi yang menekankan pentingnya kesatuan arah, pembagian peran, dan komunikasi berkesinambungan (Terry, 2006; Mintzberg, 1983), serta teori tata kelola kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015) yang menyoroiti sinergi antaraktor dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam memperkuat pemahaman mengenai peran koordinasi lintas lembaga di tingkat desa sebagai strategi efektif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, karena berfokus pada penggambaran secara mendalam mengenai peran koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih sebab memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Subjek penelitian meliputi perangkat desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi desa. Sedangkan objek penelitian difokuskan pada bentuk, pola, serta efektivitas koordinasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas koordinasi yang berlangsung di lapangan. Wawancara diterapkan untuk memperoleh informasi dari kepala desa, aparatur desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat mengenai pelaksanaan dan kendala koordinasi. Sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip desa, laporan kegiatan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan (pra-lapangan), tahap pelaksanaan, dan tahap analisis. Tahap persiapan mencakup penentuan lokasi, pemilihan informan, serta pengurusan izin penelitian. Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan proses analisis yang berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang akurat.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah peneliti memahami hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil temuan yang telah diverifikasi melalui proses triangulasi.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh lebih objektif dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana peran koordinasi Pemerintah Desa dengan BUMDes dalam pengembangan UMKM dalam bidang industri pengolahan pertanian di desa Kolam, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM dalam bidang industri pengolahan pertanian yang bergerak khususnya pada usaha pupuk dan tanaman hias dengan jenis usaha UMKM yaitu, lembaga perantara dan trading/perdagangan. BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. (Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025)

UMKM dalam bidang industri pengolahan pertanian menurut UU No. 20 Tahun 2008, didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha kecil yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari usaha menengah atau besar, berperan strategis karena tidak hanya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan menjadi berbagai produk pangan maupun bahan baku industri, tetapi juga mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi lokal, serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Nurhaedah, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang industri pengolahan pertanian atau yang sering disebut agroindustri, merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Agroindustri tidak hanya berfungsi sebagai pengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah, tetapi juga berperan dalam

meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah (Fernanda, Kusnandar, & Adi, 2024).

Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai dampak kehadiran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, kualitas produk, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku usaha. Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasakan adanya manfaat dari kerja sama dengan BUMDes, terutama dalam hal penyediaan pupuk yang berkualitas dan mendukung peningkatan penjualan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan terutama pada aspek pengembangan SDM, di mana belum banyak dilakukan pelatihan maupun pendampingan manajerial. Secara lebih rinci, hasil wawancara dengan para responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Responden | Peningkatan Pendapatan | Peningkatan Jumlah Pelanggan | Peningkatan Kualitas Produk | Peningkatan Kualitas SDM |
|----|-------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Toko Tanaman Yanu Yusuf | Pendapatan usaha bergantung pada masing-masing pelaku UMKM. Namun saat ada demo, pendapatan menurun. Tapi sejauh ini memang pendapatannya lumayan. Bantuan dari BUMDes hanya berupa banner gratis dan suplai barang dari Desa Kolam. | Jumlah pelanggan masih bergantung pada rezeki usaha masing-masing. Namun sejauh ini usaha beliau juga sering kedatangan tamu. Lalu barang dari BUMDes desa kolamnya biasanya langsung dibagikan ke beberapa UMKM binaannya. | Kualitas produk ditentukan oleh promosi pemilik usaha. Jika promosi bagus, pelanggan tertarik membeli. Produk yang dijual misalnya tanah, pupuk, dan tanaman. | Belum ada pelatihan keterampilan maupun pendampingan. Responden berharap ada kelompok tani dan pelatihan manajerial. Saat ini BUMDes hanya berperan menjual produk saja. |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|--|
| 2 | Toko Tanaman Yadani | Pendapatan usaha meningkat sejak adanya koordinasi dengan BUMDes. | Jumlah pelanggan meningkat. Dukungan berupa pupuk, tanah, dan tanaman hias yang dijual langsung oleh BUMDes. Pelanggan lebih menyukai pupuk karena kualitasnya bagus. | Kualitas produknya terutama pupuk sangat baik dan sangat banyak yang minati. | Belum ada pelatihan keterampilan maupun pendampingan. Responden berharap ada kelompok tani dan pelatihan manajerial. Saat ini BUMDes hanya fokus pada penjualan. |
| 3 | Toko Tanaman Windari Florist | Pendapatan usaha lumayan meningkat. Produk dari BUMDes, terutama pupuk, membuat konsumen lebih tertarik dan cenderung membeli karena merasa terbantu. | Jumlah pelanggan meningkat karena adanya dukungan dari BUMDes, khususnya penyediaan pupuk. Kualitas pupuk dinilai sangat baik sehingga konsumen lebih percaya dan terus membeli. | Ya, kualitas produk dinilai baik sekali, terutama dari dukungan yang diberikan oleh BUMDes melalui penyediaan pupuk yang berkualitas. | Pada awalnya ada bantuan berupa pupuk dan bahan pendukung lain. Namun, sejauh ini belum ada pelatihan atau pendampingan khusus. Responden berharap ke depan ada pelatihan keterampilan dan manajerial agar usaha bisa berkembang lebih baik. |
| 4 | Toko Tanaman Melly Florist | Pendapatan usaha bertambah karena produk pupuk dari BUMDes sangat memuaskan konsumen. Hal ini membuat | Iya, jumlah pelanggan meningkat. Banyak konsumen merasa cocok dengan produk BUMDes sehingga | Ya, kualitas produk semakin baik. Responden optimis ke depan bisa lebih meningkat lagi. | Belum ada pelatihan maupun pendampingan khusus. Selama ini pengetahuan hanya diperoleh secara otodidak dari pengalaman. Paling hanya ada gambaran singkat |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|---|
| | | penjualan lebih lancar. | otomatis meningkatkan penjualan. | | mengenai cara pemakaian pupuk (misalnya perbandingan tanah dan pupuk), tetapi tidak ada bimbingan yang lebih detail. |
| 5 | Toko Tanaman Ira Flowers | Usaha ini masih baru dan masih belum mengetahui secara pasti terkait pendapatannya. | Pelanggannya meningkat, para konsumen sangat menyukai pupuknya. | Kualitas produknya sudah baik dan ok, kalau kami perlu ada pesanan banyak, kami telpon. Kalau enggak orang ini seminggu sekali atau ke seminggu dua kali baru datang | Untuk pelatihan tidak ada. |
| 6 | Toko Tanaman Windari | Pendapatannya lumayan karena dari BUMDes dan konsumen pada menyukainya. | Hubungannya memang ya. ada lah karena kualitasnya sangat bermutu lah bagi bumdes ini | Baik sekali | Pertamanya dikasih arahan dari bumdesnya. Setelah itu baru kami lakukan supaya lebih bagus lagi. |
| 7 | Toko Tanaman Faiz Flowers | Pendapatan usaha sejak adanya koordinasi lumayan meningkat. Produk yang disediakan BUMDes, terutama pupuk dan tanaman, cukup membantu kelancaran penjualan karena | Jumlah pelanggan cenderung meningkat. Banyak konsumen merasa cocok dengan produk dari BUMDes, terutama pupuk. Hal ini membuat pelanggan lebih percaya dan terus | Kualitas produk dinilai cukup baik, terutama karena bahan yang disediakan BUMDes berkualitas. Namun, peningkatan kualitas juga sangat bergantung pada promosi dan cara pemilik usaha mengelola penjualannya. | Sejauh ini belum ada pelatihan atau pendampingan resmi dari BUMDes. Pengetahuan lebih banyak diperoleh secara otodidak melalui pengalaman sendiri, termasuk cara mengombinasikan pupuk dan tanah. Responden berharap ke depan |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|---|---|--|
| | | <p>kualitasnya bagus dan memuaskan konsumen. Namun, kadang-kadang pendapatan juga bergantung pada situasi dan usaha masing-masing pelaku UMKM.</p> | <p>membeli, sehingga omset usaha bertambah.</p> | | <p>ada pelatihan manajerial maupun kelompok tani agar keterampilan pelaku UMKM bisa lebih berkembang.</p> |
| 8 | Toko Tanaman Yunus | <p>Sejak adanya kerja sama dengan BUMDes, pemasukan usaha terasa ada peningkatan. Hal ini karena ketersediaan pupuk dan tanaman dari BUMDes cukup menunjang kebutuhan usaha dan membuat proses penjualan lebih lancar.</p> | <p>Pelanggan makin bertambah, sebab banyak yang menilai produk dari BUMDes, terutama pupuk, lebih bagus. Jadi konsumen lebih sering datang dan belanja ke toko.</p> | <p>Kualitas produk bisa dibilang stabil ke arah yang lebih baik karena bahan yang didapat dari BUMDes cukup terjamin. Walaupun begitu, hasil akhirnya tetap sangat dipengaruhi bagaimana pelaku usaha mengemas dan memasarkannya.</p> | <p>Untuk pengembangan SDM, sampai sekarang belum ada program pelatihan atau pendampingan khusus. Sebagian besar keterampilan diperoleh secara belajar sendiri dari pengalaman. Ke depan, responden berharap ada kegiatan pendampingan yang lebih terarah, misalnya pelatihan kelompok tani atau manajemen usaha.</p> |

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Pelaku UMKM Khususnya Usaha Pupuk dengan BUMDes Desa Kolam

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, hasilnya menunjukkan bahwa koordinasi Pemerintah Desa dengan BUMDes sudah memberikan dampak positif dalam hal penyediaan produk dan peningkatan pelanggan, tetapi belum maksimal dalam hal pemberdayaan SDM. Seperti disampaikan salah satu responden: *“Belum ada pelatihan, semua hanya otodidak. Kalau ada kelompok tani dan pelatihan manajerial pasti lebih baik.”* (Responden 4). Sejalan dengan itu, Junaidi, Amir, dan Hardiani (2014) dalam (Indreswari et al., 2022) menjelaskan bahwa UMKM agroindustri memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing daerah, namun memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, jaminan mutu produk, dan strategi pemasaran yang berkelanjutan.

Dengan demikian, UMKM pengolahan pertanian tidak hanya berperan dalam menyediakan produk bernilai tambah, tetapi juga menjadi penggerak utama perekonomian lokal yang perlu didukung oleh inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa koordinasi yang ada selama ini masih lebih bersifat teknis (penyediaan barang), belum sampai pada hal-hal penting seperti pelatihan keterampilan, manajemen usaha, atau pendampingan yang bisa membuat pelaku UMKM lebih berkembang.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Peran Koordinasi Pemerintah Desa dengan BUMDes dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Desa Kolam

Hasil wawancara dengan delapan responden menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dengan BUMDes di Desa Kolam sudah berjalan, tetapi masih terbatas. Kehadiran BUMDes membantu dengan cara sederhana, seperti menyediakan suplai barang atau bantuan promosi berupa spanduk/banner. Walaupun tampak sepele, hal ini menjadi bukti awal bahwa koordinasi pemerintah desa dan BUMDes memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan usaha, meskipun perannya masih terbatas. Hal tersebut mencerminkan bahwa koordinasi memang sudah berjalan, namun masih pada tahap awal (koordinasi dasar), yaitu sebatas distribusi barang dan fasilitas sederhana.

Bentuk dukungan yang paling dirasakan pelaku UMKM adalah penyediaan sarana produksi seperti pupuk, tanah, dan tanaman hias. Bantuan ini terbukti mampu menjaga kualitas produk, meningkatkan pendapatan, serta menambah jumlah pelanggan karena konsumen lebih percaya pada produk yang didukung oleh BUMDes. Hal ini sesuai dengan teori manajemen

pemasaran yang menekankan pentingnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dalam membangun loyalitas pelanggan.

Meskipun begitu, beberapa responden menilai bahwa peningkatan pendapatan dan pelanggan tersebut masih bersifat konvensional. Perkembangan usaha hanya bertumpu pada kualitas produk, sementara aspek pemasaran modern seperti penggunaan media sosial, e-commerce, atau branding bersama belum digarap. Bahkan, ada responden yang menyampaikan bahwa dukungan promosi tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan antar pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan belum menyentuh aspek promosi secara menyeluruh.

Selain itu, hampir semua responden menekankan bahwa kualitas produk saja tidak cukup untuk mendorong perkembangan usaha. Keterampilan pelaku usaha dalam mengolah, mengemas, dan memasarkan produk juga sangat penting. Sayangnya, hingga saat ini belum ada program pelatihan atau pendampingan dari BUMDes. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pengalaman pribadi (otodidak), sehingga kapasitas sumber daya manusia belum berkembang optimal. Fakta ini memperlihatkan bahwa koordinasi lebih banyak terfokus pada penyediaan input produksi daripada pemberdayaan SDM.

Jika dikaitkan dengan teori koordinasi menurut Terry, koordinasi yang efektif memerlukan kesatuan arah, pembagian peran yang jelas, dan komunikasi yang berkesinambungan. Di Desa Kolam, kesatuan arah memang sudah ada, yaitu tujuan bersama mendukung UMKM. Namun, pembagian peran masih belum jelas. BUMDes lebih terlihat sebagai penyedia barang, sedangkan pemerintah desa belum optimal menjalankan fungsi sebagai pengarah dan fasilitator. Hal ini membuat koordinasi belum maksimal dalam menciptakan ekosistem UMKM yang terpadu.

Secara umum, koordinasi pemerintah desa dengan BUMDes sudah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pendapatan, jumlah pelanggan, dan kepercayaan konsumen. Namun peran koordinasi pemerintah desa dan BUMDes masih lemah, karena belum ada program yang menyeluruh, seperti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha, strategi promosi yang modern, maupun dukungan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Nugroho (2021) menilai bahwa pola kerja sama ini mempercepat proses pengembangan UMKM, baik dalam aspek permodalan, pelatihan, maupun pemasaran, sehingga UMKM dapat

berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Agar koordinasi lebih efektif, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

1. Mengadakan pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital untuk para pelaku UMKM.
2. Membentuk kelompok usaha bersama agar UMKM punya daya tawar yang lebih kuat.
3. Bekerja sama dengan pihak luar, seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, atau dinas terkait untuk memperluas akses modal, inovasi, dan pemasaran.
4. Memperjelas peran pemerintah desa sebagai pengarah kebijakan, sementara BUMDes fokus menjalankan operasional dan pemasaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes tidak hanya sebatas menyediakan kebutuhan produksi, tetapi juga bisa membantu UMKM menjadi lebih mandiri, mampu bersaing, dan terus berkembang.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Desa dengan BUMDes terhadap Pengembangan UMKM di Desa Kolam

Hasil wawancara dengan delapan responden menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memang membawa manfaat, terutama dalam penyediaan bahan baku yang lebih mudah diakses dan berkualitas. Namun, manfaat ini masih terbatas dan belum menjawab persoalan utama pelaku UMKM. Banyak kendala yang muncul, terutama di aspek non-teknis. Responden menuturkan bahwa pendapatan usaha masih naik-turun karena dipengaruhi faktor luar, seperti inflasi, demo, dan daya beli masyarakat yang menurun. Selain itu, promosi produk masih minim. Walaupun kualitas produk bagus, bahkan ada yang sudah diuji di laboratorium, pasar yang dijangkau tetap sempit karena BUMDes belum memfasilitasi promosi bersama, baik melalui media sosial, branding, maupun pameran.

Di sisi lain, pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM juga belum berjalan. Banyak pelaku usaha yang hanya mengandalkan pengalaman sendiri tanpa dukungan peningkatan keterampilan, baik dalam manajemen usaha, pemasaran digital, maupun inovasi produk. Akibatnya, UMKM sulit berkembang lebih jauh dan bersaing dengan produk dari luar. Dapat disimpulkan bahwa kendala utama koordinasi pemerintah desa dengan BUMDes adalah:

1. Kurangnya strategi promosi dan pemasaran.

2. Belum ada program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
3. Pendapatan usaha masih rentan terhadap faktor eksternal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan praktik yang ada di lapangan. Idealnya, BUMDes tidak hanya menyediakan barang, tetapi juga menjadi fasilitator yang aktif dalam pembinaan, promosi, pelatihan, hingga inovasi produk. Merdesa (2021) mengidentifikasi bahwa kelemahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta keterbatasan kapasitas manajerial masih menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka program pemberdayaan UMKM berpotensi berjalan setengah hati dan tidak mampu mencapai target yang optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, dan penerapan regulasi yang lebih tegas menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan sinergi tersebut.

Ke depan, koordinasi yang lebih kuat sangat dibutuhkan. Misalnya dengan membuat program promosi terpadu berbasis digital, memfasilitasi UMKM ikut pameran, serta mengadakan pelatihan rutin dengan melibatkan ahli. Dengan langkah ini, peran BUMDes tidak hanya memberi manfaat jangka pendek berupa bahan baku, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

C. Strategi Agar Koordinasi Pemerintah Desa dengan BUMDes Lebih Efektif dalam Pemberdayaan UMKM

Emerson dan Nabatchi (2015), menekankan pentingnya kolaborasi tata kelola yang melibatkan aktor publik, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara inklusif (Syahsudarmi et al., 2024). Dalam hal ini, pelibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi program, tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sudarman (2021) menyatakan bahwa strategi pada dasarnya mencakup perumusan misi, penetapan tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal, perumusan kebijakan serta strategi operasional, hingga pelaksanaan yang tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, strategi dapat dipahami sebagai seperangkat langkah terencana yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Dari hasil wawancara, pelaku UMKM di Desa Kolan merasa kehadiran BUMDes cukup membantu, tapi masih ada banyak hal yang belum terjawab. Masalah utama bukan hanya soal bahan baku, melainkan juga keterbatasan modal, promosi yang lemah, dan kurangnya pengembangan keterampilan pelaku usaha. Karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh agar koordinasi pemerintah desa dengan BUMDes benar-benar bisa memperkuat UMKM. Beberapa strategi yang diusulkan responden antara lain:

1. Promosi bersama – Produk UMKM butuh promosi lebih luas lewat media sosial desa, pameran, atau festival produk. Dengan begitu, konsumen luar desa bisa lebih mengenal produk Desa Kolan.
2. Akses modal yang mudah – BUMDes bisa bekerja sama dengan koperasi, bank daerah, atau lembaga keuangan mikro untuk menyediakan kredit lunak atau program pinjaman bergulir. Dengan tambahan modal, pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha, menambah stok, atau membuat produk baru.
3. Pelatihan dan pendampingan rutin – UMKM perlu dibekali keterampilan baru, seperti digital marketing, manajemen usaha, pengemasan produk, dan pencatatan keuangan sederhana. Pelatihan tidak cukup sekali, tapi harus ada pendampingan berkelanjutan.
4. Branding kolektif – Produk UMKM Desa Kolan bisa dipasarkan dengan label bersama, misalnya “Produk Desa Kolan”, agar lebih mudah dikenal dan dipercaya konsumen.

5. Kerja sama dengan pihak luar – Pemerintah desa dan BUMDes perlu menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan dinas perdagangan. Hal ini penting untuk riset produk, pembiayaan, serta memperluas akses pasar.

Dengan strategi ini, peran pemerintah desa sebagai pengarah kebijakan dan BUMDes sebagai pelaksana operasional bisa lebih jelas. Koordinasi pun tidak hanya berhenti pada penyediaan bahan baku, tetapi juga mendorong UMKM Desa Kolam menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antara kedua lembaga tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa, meskipun masih dalam tahap awal. Bentuk koordinasi yang ada saat ini lebih banyak bersifat teknis, seperti penyediaan pupuk, tanah, serta dukungan promosi sederhana melalui spanduk dan banner. Upaya tersebut terbukti membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan pendapatan, sekaligus memperluas jumlah pelanggan karena meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pemberdayaan UMKM secara menyeluruh. Pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam hal pelatihan manajerial, inovasi produk, dan pemasaran berbasis digital. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pengalaman pribadi tanpa bimbingan yang terstruktur dari BUMDes atau pemerintah desa. Akibatnya, kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan pemanfaatan teknologi masih rendah, sehingga perkembangan usaha belum optimal.

Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah desa dan BUMDes sangat penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai pengarah kebijakan, sementara BUMDes berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan ekonomi. Sinergi keduanya dapat memperluas akses permodalan, membuka peluang kerja baru, serta memperkuat posisi UMKM dalam rantai ekonomi lokal. Dengan koordinasi yang baik, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Manfaat dari penelitian ini juga terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan bersama antara pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM. Kolaborasi strategis yang didukung komunikasi rutin, pendampingan

berkelanjutan, serta promosi kolektif akan membantu menciptakan ekosistem usaha yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital, pembentukan kelompok usaha bersama, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi dan penjualan produk lokal. Selain itu, koordinasi perlu diarahkan pada program jangka panjang yang menekankan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah desa dan BUMDes dapat benar-benar menjadi penggerak utama dalam menciptakan UMKM yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Putri, D. A., Yusran, R., Martius, Herdiansyah, D., Riyanda, R., Hasan, L., Zulkifli, Hwihanus, D., Anwar, U. A. A., Susanto, Yusman, E., & Erdawati. (2023). Ilmu Manajemen Perbekalan. In Gita Lentera.
- Arifin, Z. (2022). Peran Bumdes Dalam Penguatan Umkm Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Desa*, 7(2), 45–56.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. (2024). Kecamatan Percut Sei Tuan dalam Angka 2024 / Percut Sei Tuan District in Figures 2024 (Publikasi No. 12120.419; Katalog: 1102001.1212260). <https://deliserdangkab.bps.go.id>
- Bastian, R. Y., Rangkuti, Z., & Pratikno, Y. (2024). Pengaruh Kompetensi, Integritas Dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 1168–1181. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.1063>
- Batubara, R. A. (2022). [Analisis Peran Bumdes dalam Memperdayakan Kesejahteraan Masyarakat Agribisnis di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang] (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan).
- Center For Business Studies (Cebis). (2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 8(2). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. <Http://Journal.Unpar.Ac.Id/>
- Elani, K. A., Ayu, I., Pribadi, P., Sutikno, C., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Journal Of Community Development And Disaster Management Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Collaborative Governance In The Development Of Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes) In Kedungbanteng District, Banyumas Regency. 7(1). <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6821>
- Fernanda, N. T., Kusnandar, K., & Adi, R. K. (2024). Strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agroindustri Jenang Kedunggudel di Desa Kenep Kabupaten Sukoharjo. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(5), 422–435. <https://doi.org/10.37149/jia.v9i5.1482>

- Hamzah, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Melalui Bumdes Di Desa Teluk Sasah. *Jurnal Ilmiah Makebidi*, 4(2), 120–134.
- Indreswari, R., Wijianto, A., Yunindanova, M. B., Apriyanto, D., Agustina, A., & Adi, R. K. (2021). Model pengembangan agribisnis pertanian terpadu dengan pendekatan klaster pertanian terpadu di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 5(1), 10-19.
- Ladung, F., & Syukri, F. (2024). Implementasi Program Kegiatan Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 248–249.
- Lestari, D. (2021). Analisis Strategi Sinergi Bumdes Dan Umkm Menggunakan Rca Dan Ahp. *Jurnal Sembadha*, 3(1), 25–38.
- Marsih, Y., & Mindari, E. (2025). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 8(1), 14–26.
- Merdesa. (2021). Memperkuat Bumdes: Menggerakkan Ekonomi Desa. <https://merdesa.id/memperkuat-bumdes-menggerakkan-ekonomi-desa>
- Nurhaedah. (2022). Perkembangan UMKM dalam pembangunan pertanian industri Kota Makassar. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2), 79–85.
- Nurrahma Wardani, F., & Arif, L. (2024). R Eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V6i10.3399>
- Pariyem. (2019). Variabel Determinan Pengembangan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Pasar Sronдол (Skripsi, Universitas Negeri Semarang). http://lib.unnes.ac.id/35914/1/7101415092_Optimized.pdf
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. (2025). Bumdes Dan Jenis Usaha Bumdesa. Diakses [3 September 2025], Dari <https://bulelengkab.go.id/informasi/download/bumdes-dan-jenis-usaha-bumdesa-59.pdf>
- Pramana, D., Sihombing, D., & Armayanti, N. (2024). Ilmu Administrasi (Berbasis Studi Kasus). Medan: Merdeka Kreasi. <https://merdekakreasi.co.id>
- Salahuddin, M., & Nurhidayati, S. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ksap>
- Silvianita, A., Ahmad, M., Rubiyanti, N., Alfianur, F., Hendayani, R., Rachmawati, I., Pradana, M., Fakhri, M., Yunani, A., Kumalasari, A. D., Zahid, A., Fazrin, A., Sujak, A., Razali, R. R., & Mangsor, M. (2023). Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat Volume 4 Nomor 2 Agustus 2023 Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Mengoptimalkan Potensi Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Dan Potensi Desa Di Kabupaten Tasikmalaya. <https://doi.org/10.24198/sawala.v4i2>
- Sitokdana, M. N. N., & Tanaamah, A. R. (2016). Strategi Pembangunan E-Culture Di Indonesia. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(2). <https://doi.org/10.28932/jutisi.v2i2.439>

- Sofyan, S. (2017). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia (Vol. 11, Nomor 1).
- Sudarman. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam), 1–84.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Cet. Ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Syahsudarmi, S., Abdillah, R., Handayani, R., Rahmat, A., & Arizal, N. (2024). Pendampingan Penyusunan Sop Dalam Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, 8(3), 499–504.
- Veronica Br Siahaan, S., Kades, S., & Kikky Vuspitasari, B. (T.T.). Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume Vii Nomor 2 2020.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. Quanta. <https://doi.org/10.22460/Q.V2i2p83-91.1641>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bimbingan selama proses penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

1. Bapak Dodi Pramana, S.Sos., M.Si., selaku dosen pengampu mata kuliah *Korespondensi Bisnis* di Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Beliau telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan yang sangat berharga dalam pelaksanaan mini riset dan penyusunan artikel ini.
2. Dea Safitri
3. Febri Angelyos Br. Manalu
4. Furqan Young
5. Kelvin Pakpahan
6. Pihak Aparatur Desa dan BUMdes, yang telah berkenan menjadi objek penelitian dan memberikan akses informasi serta data yang relevan untuk kepentingan ilmiah. Keterbukaan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat membantu dalam memperkaya pemahaman mengenai peran koordinais pemerintah desa dengan BUMDes di dunia kerja nyata.